

Jaminan Pendapatan Dasar, Solusi Kemiskinan Aceh



Nurlaili, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Foto: Dok. Pribadi.

Oleh Nurlaili

PANDEMI Covid-19 telah membahwa kepada krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade. Wabah virus korona bukan hanya menandakan krisis besar di sektor kesehatan, tapi juga telah mendorong dunia ke arah krisis ekonomi ke arah resesi global.

Untuk konteks Aceh, pandemi bukan hanya membuat ekonomi terpukul, tapi disaat bersamaan angka kemiskinan dan pengangguran berlomba naik. Tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 834,24 ribu jiwa di Aceh. Tak hanya penduduk miskin, pengangguran di Aceh melonjak 169 ribu orang dari sebelumnya 167 ribu orang.

Secara histori, paling tidak sudah sekitar 19 tahun tepatnya dari tahun 2002 hingga 2021 Aceh terus menerus menjadi jawara kemiskinan di pulau Sumatra. Untuk level nasional Aceh juga kerap tak ketinggalan masuk 10 besar provinsi dengan predikat termiskin.

Kondisi memprihatinkan, sekaligus memalukan ini, terus menerus terjadi meski disaat bersamaan Aceh juga mendapat distribusi pendapatan melimpah dari pusat setiap tahun. Dana Otonomi Khusus (Otsus) misalnya, total 88,433 triliun telah diperoleh Aceh dari 2008 hingga 2021. Belum lagi berbicara dana tambahan hasil migas yang berkisar ratusan milyar juga diperoleh saban tahun.

Kendati demikian kucuran dana melimpah ternyata terbukti jangankan membawa rakyat Aceh sejahtera, sekadar melepas status daerah termiskin saja terbukti Aceh belum mampu. Tak heran kemudian Aceh menjadi anomali tersendiri dalam wilayah Indonesia. Miskin di saat konflik dan semakin miskin di era damai.

George Bernard Shaw pernah berujar bahwa "*lack of money is the root of all evil*". Rayuan setan akan terdengar indah ketika manusia lapar dan tidak memiliki uang tunai. Para ekonom dunia sepakat bahwa kekurangan uang adalah sumber dari munculnya berbagai kejahatan.

Itulah mengapa setiap pengangguran meningkat, kriminalitas melompat. Tak heran akibat merajalelanya kemiskinan dan pengangguran, berita kriminalitas di Aceh menjadi pemandangan lazim menghiasi beranda media massa. Kasus kriminalitas seperti pencurian dan peredaran narkoba yang marak belakangan di Aceh menjadi cermin akan minimnya pilihan untuk bertahan hidup bagi sebagian besar rakyat Aceh.

Jangan lupa bahwa akar konflik Aceh sedari awal muncul eksis ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan redistribusi kesejahteraan. Kita tentu belum lupa bahwa argumen tidak meratanya kesejahteraan dan ketidakadilan Aceh di era migas telah membuat seorang Hasan Tiro mengangkat senjata dan melakukan perlawanan kepada republik ini.

Sejarah kelam konflik Aceh tersebut tidak hanya membuat Aceh terpukul namun juga meninggalkan duka mendalam bagi Aceh. Aceh terus berputar dalam siklus kemiskinan yang tidak pernah pudar meski telah berganti era. Sungguh sebuah ironi di tengah kucuran dana melimpah namun rakyat Aceh sendiri justru terjebak dalam siklus kefakiran.

Jaminan Pendapatan Dasar Sebagai Solusi

Kondisi ekonomi Aceh yang kian terpukul eksis tata kelola pemerintahan amburadul ditambah efek pandemi korona, membuat cara cara konvensional dalam mengatasi kemiskinan selama ini terbukti tidak efektif. Perlu langkah radikal dalam menyelesaikan akar kemiskinan di Aceh.

Memang pemerintah sendiri saat ini sudah menerapkan sejumlah program stimulus bantuan penanggulangan kemiskinan. Contohnya, stimulus listrik rumah tangga, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH). Namun semua program ini rentan dengan *error positive*, dimana yang tidak berhak malah menerima bantuan karena bisa mengakali persyaratan. Sebaliknya, muncul juga *error negative*, dimana mereka yang seharusnya menerima, malah tidak masuk daftar penerima karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan administratif.

Tanggal: 15 April 2022

Post by: [ayi](#)

Kategori: [Artikel Opini](#), [Geliat Mahasiswa](#),

Tags: [Unimal](#), [Ekonomi Unimal](#), [Unimal Hebat](#),